

**CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMbungGUNG TAHUN 2018-2023  
S.D TRIWULAN III TAHUN 2023**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

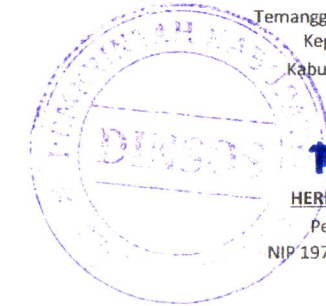
No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023	STATUS		FAKTOR PENDODONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	UK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>A</b>	<b>BIDANG SOSIAL</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>																			
		Angka Kemiskinan	%	9,87	9,36	11,6	10,36	10,00	9,80	9,42	9,96	10,17	9,33	9,33	100,00	TT					
		Jumlah penduduk miskin								72.570	77.330	79.100	73040								
		Jumlah penduduk								770.382	794.055	800.276	807440								
		<b>INDIKATOR SASARAN</b>																			
	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	%		48	48	63	63	63	na	na	116,70	64,30	66,52	100,00	TT	Adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yang bersumber dari APBD II APBD I dan APBN	terdapat beberapa kegiatan yg masih dapat dilaksanakan dikarenakan melunggu penetapan perubahan dan mekanisme penyaluran bansos DBHCHT	Perlu diajaknya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan		
		Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani										141.064	96774	98814							
		KK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diubah menjadi KK DKD dikali 100%										120873	150.509	148.539							
		<b>INDIKATOR PROGRAM</b>																			
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	TT	Meningkatnya kemampuan dan keinginan dari PSKS untuk berperan serta dalam usaha kesejahteraan sosial, terbukti dengan meningkatnya peran serta PSKS dalam ikut mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkungannya dan masyarakat sekitarnya	Kurangnya anggaran fasilitasi bagi peningkatan kemampuan dan peran serta Sumber Daya Manusia PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	Pemberian anggaran untuk fasilitasi dan pembinaan kegiatan PSKS. Pemberian tali asih sebagai penghargaan terhadap kinerja PSKS.		
		Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial								226	294	167	220	173							
		Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial X 100 %								226	294	167	220	173							
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00	100,00	TT	Adanya anggaran dari pemerintah berupa bantuan sosial	Adanya pengurangan anggaran pada fasilitasi, sehingga kegiatan bimbingan sosial tidak dapat dilaksanakan secara maksimal	Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan eks pekerja migran bermasalah sosial dan ekonomi		
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan								10	10	10	10	-							
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%								10	10	10	10	-							
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	TT	Adanya bantuan sosial caring Pengaman Sosial yang dapat membantu dalam menagani PPKS yang membutuhkan.	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus	Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/ UPT kementerian Sosial yang menangani terkait permasalahan anak.		
		Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial								53	41	271	364	579							
		Jumlah anak terlantar dikali 100%								53	41	271	364	579							
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00	100,00	TT	Adanya bantuan sosial caring Pengaman Sosial yang dapat membantu dalam menagani PPKS yang membutuhkan.	Masih kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan bimbingan bagi disabilitas di Kabupaten TembungGung	Melaksanakan koordinasi dengan UPT Kementerian sosial (Centra Terpadu Kartini) dalam penanganan disabilitas di Kabupaten TembungGung		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial								247	536	582	619	572							
		Jumlah disabilitas terlantar dikali 100%								247	536	582	619	572							
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00	100,00	TT	Adanya bantuan sosial caring Pengaman Sosial yang dapat membantu dalam menagani PPKS yang membutuhkan.	Masih banyaknya lanjut usia yang tidak dapat diterima di panti pelayanan lansia dikarenakan kondisi lansia yang sudah bedrest	Koordinasi dengan pihak yang terkait dengan penanganan lansia terlantar, terus melakukan koordinasi dengan pemprov terkait pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar yang mengalami kedisabilasan.		
		Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi								61	48	181	2.246	476							
		Jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%								8	7	181	2.246	476							

		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	TT		Adanya Rumah Singgah dan adanya tenaga profesional dibidangnya	Kurangnya anggaran untuk operasional Rumah Singgah	Perlu adanya dukungan anggaran untuk operasional rumah singgah
					Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat						182	77	103	88	71				
					Jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%						182	77	103	88	71				
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,18	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,31	2,20	4,22	11,58	4,80	100,00	TT	Adanya anggaran APBD II, Adanya dukungan kerjasama dengan instansi terkait baik UPT Dinas Sosial Provinsi maupun UPT Kementerian Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS di luar panti merupakan kegiatan respon kasus, dan terdapat kondisimasih kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan bimbingan bagi disabilitas, terdapatnya lansia yg tidak dapat dilayani di panti dikarenakan kondisi bedrest, dan kurangnya anggaran untuk operasional Rumsing.	Koordinasi dengan Dinas instansi terkait, perlu dukungan anggaran untuk bimbingan dan pembinaan lanjut. Selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.
					Jumlah PPKS diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial						349	591	1138	3317	1658				
					jumlah PPKS di luar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali						26.440	26.883	26.973	28.654	34.556				
4	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	0,00	0,00	UK	Adanya dukungan kerjasama dengan pengurus panti asuhan sehingga bansos di Anggaran Perubahan tersalur sesuai target waktu	Adanya Perubahan penerima menyebabkan Perubahan di Anggaran Perubahan dan SK Bupati	Selalu Koordinasi dan komunikasi dengan pengurus panti terkait perubahan kebijakan.
					Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial						371	381	381	321	-				
					Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial x 100%						371	381	381	321	321				
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	n.a	n.a	n.a	75	80	85	54	63	98,78	100,00	100,00	100,00	TT	Adanya dukungan dari Dana Desa terhadap pendataan Fakir Miskin	Untuk Kelurahan belum memiliki anggaran untuk pendataan Fakir Miskin	Mengusulkan adanya anggaran khusus pendataan Fakir Miskin di Kelurahan
					Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval (Diubah menjadi jumlah jiwa dalam DKD)						56.414	68.262	490.347	420.593	404.151				
					Jumlah rumah tangga dalam DTKS (Diubah menjadi jumlah jiwa dalam DKD)						104.120	108.695	496.392	420.593	404.151				
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	n.a	n.a	n.a	85	90	95	100	100	78,44	91,11	100,34	100,00	TT	Adanya penambahan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan sosial dari sumber DBHCHT	Masih ada penerima bantuan yang belum mempunyai KTP elektronik	Koordinasi dengan Disdukcapil terkait percepatan perekaman KTP elektronik
					Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial (diubah menjadi jumlah jiwa yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial)						413.890	422.930	389.391	383.195	405.534				
					Jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS (diubah menjadi jumlah jiwa dalam DKD)						360.705	369.235	496.392	420.593	404.151				
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	n.a	n.a	n.a	10	10,1	10,2	-	-	63,72	100,00	100,00	100,00	TT	Adanya dukungan kerjasama baik dengan Pendamping UEP KUBE, Pengurus KUBE maupun Pemerintah Desa	Belum adanya embrio UEP KUBE sehingga pada tahun 2023 masih fokus pada rintisan embrio UEP KUBE (belum ada penyaluran Bansos)	Memotivasi UEP KUBE yang masih ada, agar mempertahankan kegiatan usaha ekonomi produktif dan menjalin kemilraan
					Jumlah UEP dan KUBE yang aktif						-	-	202	65	301				
					Jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%						-	-	317	65	301				
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	-	48	48	48	48	48	46	83	111,90	61,70	54,28	100,00	TT	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Temanggung dilihat dari data DKD Kabupaten Temanggung	Masih ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran disebabkan karena data penerima bantuan berasal dari pusat dan tidak diadakan verwal oleh daerah.	Untuk diadakan verwal data penerima yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan data penerima bantuan.
					Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun						47.742	100.534	135.257	92.864	80.624				
					Jumlah DTKS skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100% (diubah menjadi jumlah KK DKD dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%)						103.280	120.876	120.876	150.509	148.539				

	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	TT		Sudah adanya dan solidnya relawan bencana yang siap untuk penanganan bencana di Kab. Temanggung	Kurangnya anggaran, sehingga kita tidak bisa melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana	Penambahan anggaran penanganan bencana
			<i>Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial</i>								55	58	51	206	123				
			<i>Jumlah korban bencana dikali 100%</i>								55	58	51	206	123				
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	TT		Taman makam pahlawan merupakan penghargaan bagi jasa para pahlawan (memelihara nilai-nilai kepahlawanan)	Kurangnya anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana makam, dan juga untuk pembuatan lobang makam yang merupakan salah satu pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada jenazah para pahlawan dan keluarganya.	Penambahan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana taman makam pahlawan dan untuk pembuatan lobang makam.
			<i>Jumlah TMP yang dipelihara</i>								2	2	2	2	2				
			<i>Jumlah TMP x 100%</i>								2	2	2	2	2				
<b>JUMLAH INDIKATOR SASARAN</b>			<b>1</b>	<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>											<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>JUMLAH INDIKATOR PROGRAM</b>			<b>14</b>	<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>											<b>92,86</b>	<b>13</b>	<b>1</b>		
<b>JUMLAH IKPD</b>			<b>15</b>	<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>											<b>96,43</b>	<b>14</b>	<b>1</b>		

**Keterangan :**

Status	Capaian s.d 2023
TT (Telah Tercapai)	100%
UK (Upaya Keras)	0-99,99 %



Temanggung, Oktober 2023  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung

**HERI KARDONO, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19790709 199912 1 001